

Network Configuration Strategies for Digital Governance and Regional Political Stability

Strategi Konfigurasi Jaringan untuk Tata Kelola Digital dan Stabilitas Politik Regional

Eka Nugraha Sakti Wicaksana

{ ekanugrahasw@gmail.com }

Muhammadiyah University Sidoarjo

Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep,

Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 612151

Abstract. *In an increasingly digital global context, information systems have become essential tools in supporting political stability. In Sidoarjo Regency, the National Unity and Politics Agency (Bakesbangpol) utilizes information technology to enhance transparency, public participation, and political oversight. By leveraging effective information systems, it is expected to strengthen government legitimacy and encourage community involvement in the political process, which in turn can reduce potential conflicts and increase public trust in government institutions. By addressing existing challenges and developing the necessary infrastructure, information systems can serve as effective tools in supporting a more inclusive and responsive political process.*

Keywords - Bakesbangpol; politics; society; technology; digital

Abstrak. *Dalam konteks global yang semakin digital, sistem informasi telah menjadi alat penting dalam mendukung stabilitas politik. Di Kabupaten Sidoarjo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, partisipasi masyarakat, dan pengawasan politik. Dengan memanfaatkan sistem informasi yang efektif, diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses politik, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.*

Dengan mengatasi tantangan yang ada dan mengembangkan infrastruktur yang diperlukan, sistem informasi dapat menjadi alat yang efektif dalam mendukung proses politik yang lebih inklusif dan responsif.

Kata Kunci - Bakesbangpol; politik; masyarakat; teknologi; digital

I. PENDAHULUAN

pemerintahan yang semakin modern dan dinamis, penggunaan sistem informasi telah menjadi elemen yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam upaya mendukung stabilitas politik yang berkelanjutan. Di Kabupaten Sidoarjo, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memainkan peran yang signifikan dalam menjaga dan memperkuat stabilitas politik di daerah tersebut dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi, termasuk platform komunikasi virtual seperti Zoom. Melalui penerapan konfigurasi jaringan yang tepat dan sistem pemantauan yang efektif, Bakesbangpol mampu meningkatkan tingkat transparansi dalam proses pemerintahan, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai pentingnya sistem informasi dalam konteks dukungan terhadap stabilitas politik, serta menjelaskan bagaimana penelitian mengenai konfigurasi jaringan dan sistem monitoring pada platform Zoom dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dengan demikian, diharapkan pembaca dapat memahami peran vital yang dimainkan oleh teknologi informasi dalam membangun pemerintahan yang lebih responsif dan inklusif.

Pengembangan infrastruktur jaringan internet di Bakesbangpol sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, Bakesbangpol dapat memastikan bahwa infrastruktur jaringan yang ada dapat mendukung tujuan organisasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Tujuan

1. Meningkatkan Efisiensi Operasional

- Optimalisasi Proses Kerja: Pengembangan infrastruktur jaringan internet bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional di Bakesbangpol dengan menyediakan konektivitas yang lebih baik dan akses yang lebih cepat ke informasi dan sumber daya.
 - Pengurangan Waktu dan Biaya: Dengan infrastruktur yang lebih baik, Bakesbangpol dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dan operasional, serta mengurangi biaya yang terkait dengan komunikasi dan pengelolaan data.
- 2. Mendukung Kegiatan yang Melibatkan Masyarakat**
- Fasilitasi Partisipasi Publik: Infrastruktur jaringan yang kuat memungkinkan Bakesbangpol untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti forum diskusi, webinar, dan konsultasi publik secara online.
 - Akses Informasi yang Lebih Baik: Dengan pengembangan jaringan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bakesbangpol, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Politik**
- Pemberdayaan Masyarakat: Dengan infrastruktur yang mendukung, Bakesbangpol dapat memberdayakan masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses politik, memberikan suara, dan menyampaikan aspirasi mereka.
 - Penggunaan Teknologi untuk Keterlibatan: Pengembangan jaringan internet memungkinkan penggunaan teknologi digital untuk mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, seperti survei online dan platform diskusi, yang dapat membantu Bakesbangpol memahami kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 4. Memastikan Keberlanjutan dan Keamanan Jaringan**
- Keamanan Data: Salah satu tujuan penting dari pengembangan infrastruktur adalah untuk memastikan bahwa data yang dikelola oleh Bakesbangpol aman dari ancaman siber dan kebocoran informasi.
 - Kesiapan Menghadapi Krisis: Infrastruktur yang baik juga memastikan bahwa Bakesbangpol siap menghadapi situasi darurat, dengan sistem yang dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi yang tidak terduga.

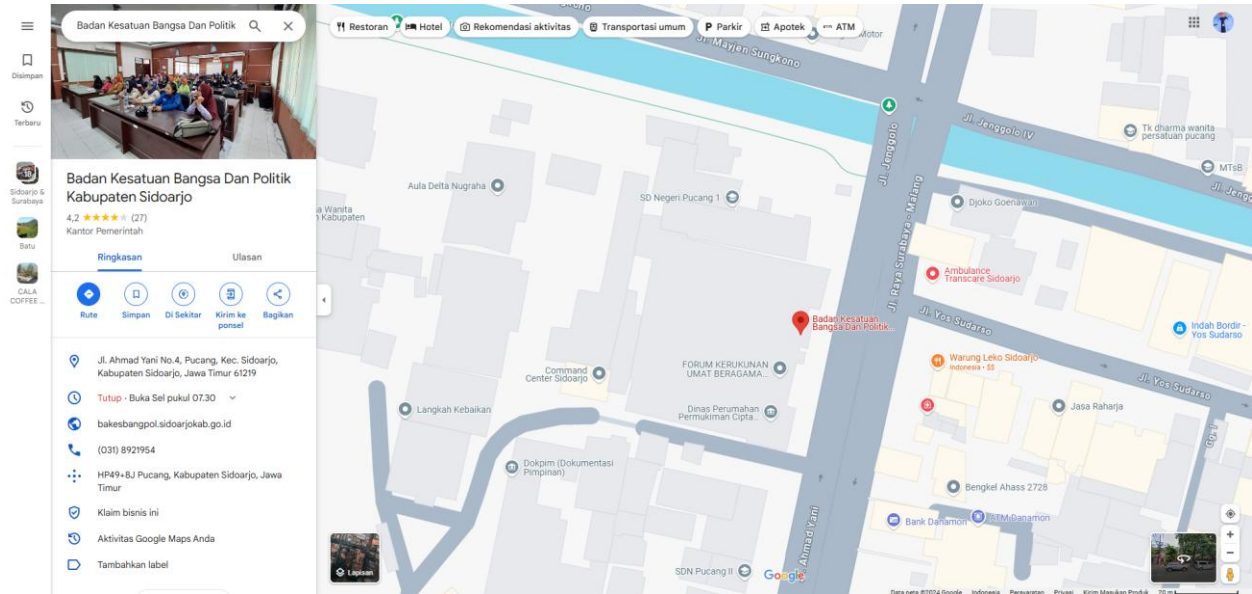
Manfaat

- 1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Transparansi**
- Akses Informasi yang Lebih Baik: Dengan infrastruktur jaringan yang kuat, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan dan program yang dijalankan oleh Bakesbangpol. Hal ini meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pemerintah.
 - Penyampaian Informasi Secara Real-Time: Bakesbangpol dapat menyampaikan informasi penting kepada masyarakat secara langsung dan cepat, mengurangi potensi misinformasi.
- 2. Mendorong Partisipasi Masyarakat**
- Fasilitasi Keterlibatan Publik: Infrastruktur yang baik memungkinkan Bakesbangpol untuk mengadakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, seperti forum diskusi dan webinar. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.
 - Pengumpulan Umpan Balik: Dengan menggunakan teknologi, Bakesbangpol dapat mengumpulkan umpan balik dari masyarakat melalui survei online, yang membantu memahami kebutuhan dan harapan masyarakat.
- 3. Memperkuat Keamanan Data**
- Perlindungan Informasi Sensitif: Pengembangan infrastruktur jaringan juga mencakup langkah-langkah keamanan untuk melindungi data sensitif yang dikelola oleh Bakesbangpol. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.
 - Kesiapan Menghadapi Ancaman Siber: Dengan infrastruktur yang baik, Bakesbangpol dapat lebih siap menghadapi ancaman siber dan menjaga kontinuitas operasional dalam situasi darurat.
- 4. Mendukung Pengambilan Keputusan yang Berbasis Data**
- Analisis Data yang Efektif: Infrastruktur jaringan yang kuat memungkinkan Bakesbangpol untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan lebih baik, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - Monitoring Kinerja Program: Dengan sistem monitoring yang efektif, Bakesbangpol dapat mengevaluasi kinerja program dan kebijakan secara real-time, sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan.
- 5. Meningkatkan Kolaborasi dan Koordinasi**
- Kerjasama Antar Lembaga: Infrastruktur jaringan yang baik memfasilitasi kolaborasi antara Bakesbangpol dan lembaga pemerintah lainnya, serta organisasi non-pemerintah, dalam menjalankan program-program yang mendukung stabilitas politik.

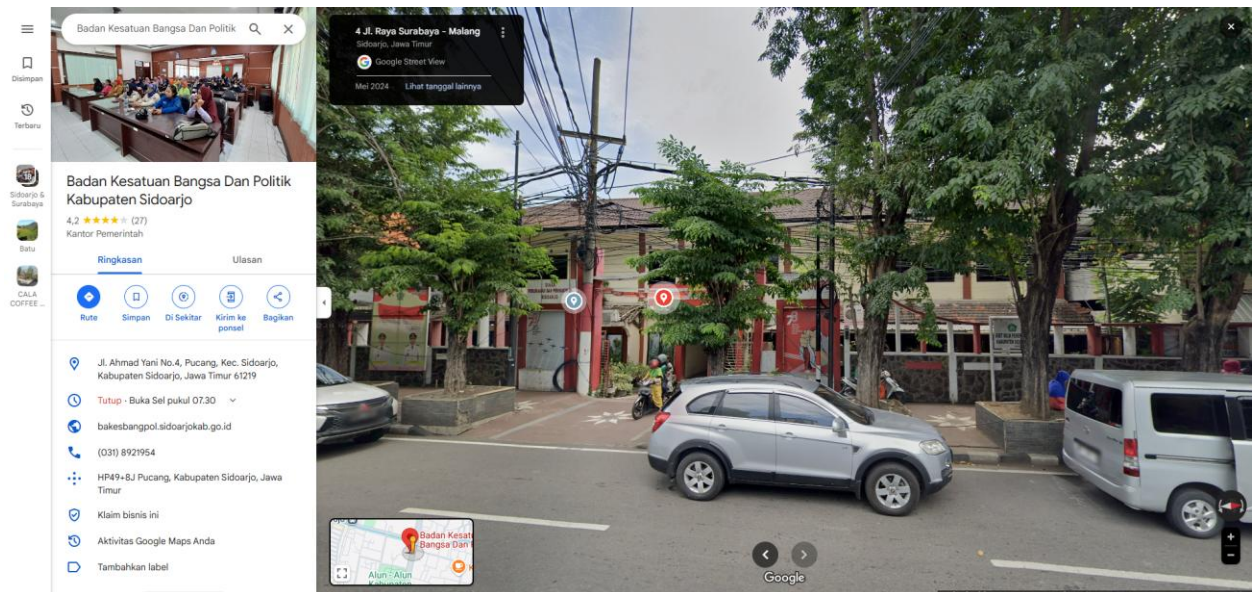
- Penggunaan Alat Kolaborasi Digital: Dengan konektivitas yang baik, Bakesbangpol dapat memanfaatkan alat kolaborasi digital untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Kondisi Lingkungan Praktik Kerja Lapangan

Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo, Jl. Ahmad Yani No.4, Pucang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61219.



Gambar 1.1 Peta Lokasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1.2 Lingkungan Depan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

Waktu Pelaksanaan Magang

Berdasarkan arahan dari Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setiap mahasiswa diharapkan dapat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau magang setelah menyelesaikan Ujian Akhir Semester. Program magang ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis yang berharga sebelum mahasiswa memulai perkuliahan semester ganjil.

Jadwal Pelaksanaan Magang

- **Tanggal Pelaksanaan:** Magang akan dilaksanakan mulai **1 Agustus 2024** hingga **1 September 2024**, dengan total durasi **31 hari**.

- **Waktu Kerja:**
 - ✓ **Senin sampai Kamis:** Jam kerja dimulai dari **08:00 hingga 16:00**, dengan total waktu kerja **10 jam** per hari.
 - ✓ **Jumat:** Jam kerja dimulai dari **08:00 hingga 14:00**, dengan total waktu kerja **8 jam**.

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

- **Visi**
Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo Yang Sejahtera, Maju, Berkarakter Dan Berkelanjutan
- **Misi**
 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan Dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dan Kemudahan Berusaha.
 2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Fokus Pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa Dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan Dan Mengurangi Kemiskinan.
 3. Membangun Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Yang Modern Dan Berkeadilan Dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
 4. Membangun SDM Unggul Dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan Serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
 5. Mewujudkan Masyarakat Religius Yang Berpegang Teguh Pada Nilai-Nilai Keagamaan Serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Tujuan

Tujuan Bakesbangpol Sidoarjo mencerminkan komitmen lembaga ini untuk menciptakan masyarakat yang bersatu, aktif, dan terlibat dalam proses politik. Dengan fokus pada partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengawasan kebijakan, Bakesbangpol berupaya untuk mendukung stabilitas politik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo

Berikut adalah penjelasan mengenai struktur organisasi di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo, yang terlampir di bawah ini.



Gambar 1.3 Struktur Organisasi yang terbentuk pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

II. METODE

Penelitian ini memiliki tujuan utama untuk melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana sistem informasi dimanfaatkan dalam rangka mendukung stabilitas politik. Fokus dari penelitian ini adalah pada studi konfigurasi jaringan serta pemantauan penggunaan aplikasi Zoom di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo. Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menerapkan metode yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran dan kontribusi teknologi informasi dalam konteks politik yang ada. Melalui analisis yang sistematis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang interaksi antara teknologi dan dinamika politik di wilayah tersebut.

Penelitian ini dirancang dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam pemanfaatan sistem informasi dalam mendukung stabilitas politik. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada studi konfigurasi jaringan serta pemantauan penggunaan aplikasi Zoom di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sidoarjo. Dalam proses penelitian, peneliti menggunakan metode yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dengan penerapan kedua pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai peran teknologi informasi dalam konteks politik yang sedang berlangsung. Melalui analisis yang terstruktur dan sistematis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara teknologi dan dinamika politik di daerah tersebut, serta bagaimana teknologi informasi dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas politik yang lebih baik.

Metode Monitoring

- **Rekaman Pertemuan:** Menggunakan fitur rekaman Zoom untuk menyimpan sesi pertemuan. Rekaman ini dapat dianalisis untuk mengevaluasi kualitas diskusi dan keputusan yang diambil.

- **Pengumpulan Data Partisipasi:** Mencatat jumlah peserta, durasi pertemuan, dan tingkat keterlibatan peserta (misalnya, jumlah pertanyaan yang diajukan atau komentar yang diberikan).
- **Survei Pasca Pertemuan:** Mengirimkan survei kepada peserta setelah pertemuan untuk mengumpulkan umpan balik tentang pengalaman mereka dan isu yang dibahas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Inisiasi Proyek

- ❖ Tahap ini melibatkan penentuan ruang lingkup dan tujuan dari studi jaringan. Ini mencakup identifikasi kebutuhan akan infrastruktur jaringan yang kuat untuk mendukung operasi Bakesbangpol.
- ❖ Studi Kelayakan: Menilai infrastruktur jaringan yang ada dan menentukan kelayakan perbaikan yang diusulkan.

2. Fase Perencanaan

- ❖ Pada tahap ini, perencanaan rinci dilakukan untuk menguraikan bagaimana studi jaringan akan dilaksanakan, termasuk timeline, sumber daya, dan metodologi.
- ❖ Menentukan Ruang Lingkup: Menguraikan dengan jelas tujuan studi jaringan, termasuk area fokus spesifik seperti konfigurasi, keamanan, dan pemantauan.
- ❖ Alokasi Sumber Daya: Mengidentifikasi dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan, termasuk personel, anggaran, dan alat teknologi yang dibutuhkan untuk studi.
- ❖ Perencanaan Manajemen Risiko: Mengidentifikasi risiko potensial yang terkait dengan studi jaringan dan mengembangkan strategi untuk menguranginya.

3. Fase Pengumpulan Data

- ❖ Fase ini melibatkan pengumpulan data terkait infrastruktur jaringan yang ada dan kinerjanya.
- ❖ Penilaian Jaringan: Melakukan penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur jaringan yang ada, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas.
- ❖ Survei dan Wawancara: Mengumpulkan data kualitatif dari staf Bakesbangpol mengenai pengalaman mereka dengan jaringan saat ini dan tantangan yang mereka hadapi.
- ❖ Implementasi Alat Pemantauan: Menyiapkan alat pemantauan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang kinerja jaringan, termasuk penggunaan bandwidth, latensi, dan waktu henti.

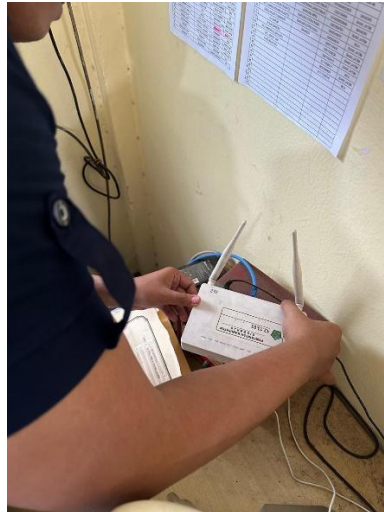
4. Fase Analisis

- ❖ Pada fase ini, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area yang perlu diperbaiki dalam infrastruktur jaringan.



Gambar 1.4 Saya sedang menganalisis perangkat jaringan pada Ruang Staff
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

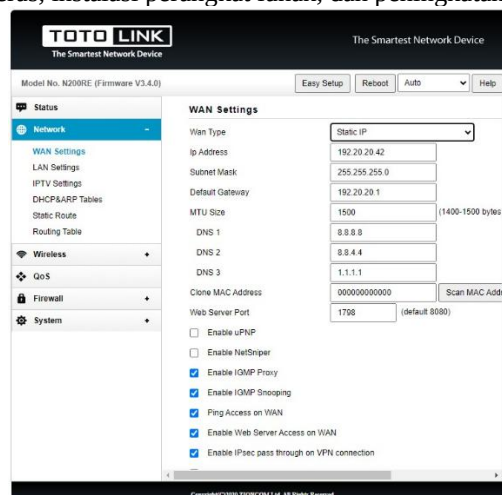
- ❖ Pelaporan Temuan: Menyiapkan laporan yang merangkum temuan analisis, termasuk rekomendasi untuk perbaikan dan peningkatan infrastruktur jaringan.



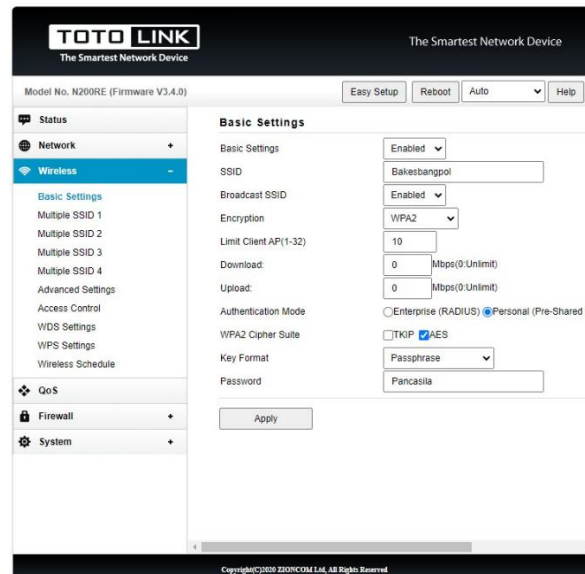
Gambar 1.5 Saya sedang Pengujian dan Validasi perangkat jaringan pada Ruang Staff Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

5. Fase Implementasi

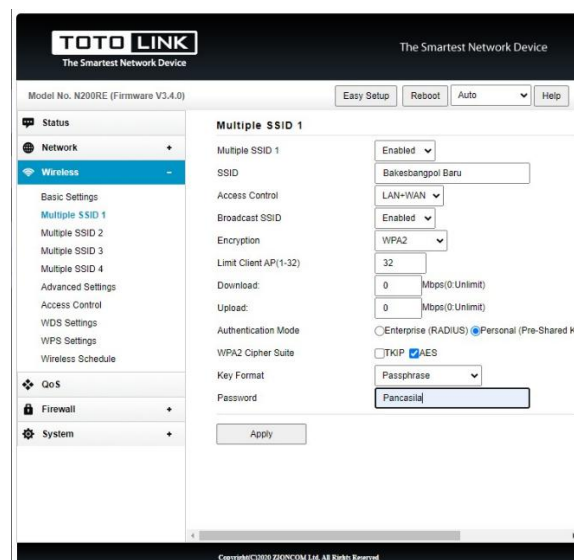
- ❖ Fase ini melibatkan penerapan perubahan yang direkomendasikan pada infrastruktur jaringan berdasarkan analisis.
- ❖ Konfigurasi Jaringan: Melakukan penyesuaian yang diperlukan pada konfigurasi jaringan, termasuk peningkatan perangkat keras, instalasi perangkat lunak, dan peningkatan keamanan.



Gambar 1.6 Konfigurasi IP Address pada router Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1.7 Konfigurasi Sinyal SSID Bakesbangpol sebelum diganti pada router Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 1.8 Konfigurasi Sinyal SSID Bakesbangpol Baru sebelum diganti pada router Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sidoarjo.

- ❖ Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan bagi staf Bakesbangpol tentang sistem dan alat jaringan baru untuk memastikan penggunaan dan pengelolaan yang efektif.
 - ❖ Pengujian dan Validasi: Melakukan pengujian untuk memvalidasi kinerja infrastruktur jaringan yang diperbarui dan memastikan bahwa ia memenuhi kebutuhan operasional Bakesbangpol.
- 6. Fase Pemantauan dan Evaluasi**
- ❖ Fase terakhir ini melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap infrastruktur jaringan untuk memastikan bahwa ia terus memenuhi kebutuhan Bakesbangpol.
 - ❖ Pemantauan Kinerja: Menerapkan alat pemantauan berkelanjutan untuk melacak kinerja jaringan dan mengidentifikasi masalah yang muncul.
 - ❖ Tinjauan Berkala: Melakukan tinjauan rutin terhadap infrastruktur jaringan

IV. KESIMPULAN

Melalui penerapan teknologi informasi yang efektif, Bakesbangpol tidak hanya mampu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi masyarakat, tetapi juga mendorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan. Fasilitas seperti forum diskusi dan webinar yang diadakan secara online memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan umpan balik, sehingga menciptakan dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga. Dengan demikian, sistem informasi berkontribusi signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

PENUTUP

Dalam penyusunan artikel ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Hamzah Setiawan, S.Kom., M.Kom, serta Ketua Program Studi, Ade Eviyanti, S.Kom., M.Kom, atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan. Keberhasilan penelitian ini tidak lepas dari arahan dan masukan berharga yang telah mereka sampaikan selama proses penyusunan.

Kami berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang kami teliti. Selain itu, kami juga berharap agar hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi dan praktisi. Akhir kata, semoga kerja keras dan dedikasi yang telah dicurahkan dalam penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, serta mendorong inovasi dan kemajuan di masa depan. Terima kasih.

REFERENSI

- [1] Situs Layanan Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo: <https://bakesbangpol.sidoarjokab.go.id/>
- [2] Situs resmi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: <https://umsida.ac.id/>
- [3] Situs Layanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo <https://sidali.sidoarjokab.go.id/>
- [4] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Panduan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- [5] Rudianto, A. (2021). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 45-60.
- [6] Susanto, B. (2019). Digitalisasi dan Partisipasi Publik dalam Proses Politik. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 8(2), 123-136.
- [7] Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2022). Strategi Nasional Keamanan Siber. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- [8] Alamsyah, R., & Hidayat, R. (2020). Analisis Kinerja Sistem Informasi dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 7(3), 200-215.
- [9] Putri, A. (2021). Inovasi Digital dalam Pengelolaan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 78-92.
- [10] Kurniawan, D. (2022). Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Keterlibatan Publik dalam Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Sosiologi dan Politik*, 10(4), 300-315.
- [11] Sari, I. (2023). Transformasi Digital dalam Pemerintahan: Studi Kasus Bakesbangpol Sidoarjo. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 150-165.
- [12] Nugroho, S. (2021). Keamanan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan. *Jurnal Teknologi dan Keamanan Informasi*, 9(1), 55-70.
- [13] U. Pribadi, M. Iqbal, M. A. Ibrahim, Juhari, and Y. Ahdarrijal, "Nexus of public organization, transparency, and accountability in Indonesia's digital governance," *Journal of Public Affairs*, vol. 24, no. 3, Art. no. e2940, 2024, doi: 10.1002/pa.2940.

- [14] A. N. Arfitsani and A. Prathama, "Inovasi perencanaan anggaran belanja kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo," *Public Service and Governance Journal*, vol. 6, no. 1, 2025, doi: 10.56444/psgj.v6i1.2385.
- [15] N. Nurhidayat, A. Nurmandi, and U. Congge, "Bridging the digital divide: Analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index," *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 14, no. 2, 2024, doi: 10.26618/ojip.v14i2.14435.